ABSTRAK

Suatu karya lagu atau musik sebagai hasil cipta yang meliputi kombinasi melodi, lirik, aransemen, serta notasi yang secara keseluruhan membentuk kesatuan utuh. Dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual, karya musik termasuk objek yang dilindungi melalui hak cipta. Meskipun dilindungi hak cipta, pembayaran mengenai royalti lagu dan/atau musik pada restoran masih minim. Minimnya kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman tentang perizinan dikalangan masyarakat dan pelaku usaha, ditambah dengan terbatasnya jangkauan Lembaga Mangajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang disebabkan oleh sarana dan prasarana LMKN yang belum memadai. Hal ini membuat pengawasan dan penegakan terkait royalti di daerah-daerah yang belum dijangkau masih sangat sulit, sehingga penggunaan musik di restoran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi sangat mudah terjadi. Akibatnya, pelaku usaha restoran masih bebas memutar musik memang ada untuk didengarkan membuat fungsi pengelolaan royalti oleh LMKN menjadi tidak efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya Permasalahan dalam penelitian ini mengenai mekanisme penetapan jumlah royalti yang harus dibayarkan konsumen kepada pencipta lagu dan penegakan hukum atas pembayaran hak ekonomi atas lagu dan/atau musik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penguatan royalti lagu/dan atau musik pada restoran dalam hal pengelolaan royalti di Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan royalti dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Royalti Lagu, Restoran.

ABSTRACT

A song or musical work as a creative result that includes a combination of melody, lyrics, arrangement, and notation that as a whole forms a complete unity. In the Intellectual Property Law system, musical works are included as objects protected by copyright. Although protected by copyright, payment of royalties for songs and/or music in restaurants is still minimal. The lack of awareness, compliance, and understanding of licensing among the public and business actors, coupled with the limited reach of the National Collective Management Institute (LMKN) caused by inadequate facilities and infrastructure of LMKN. This makes supervision and enforcement related to royalties in areas that have not been reached still very difficult, so that the use of music in restaurants for personal economic gain is very easy to occur. As a result, restaurant business actors are still free to play music that is indeed there to be listened to, making the royalty management function by LMKN ineffective and not running as it should. The problem in this study concerns the mechanism for determining the amount of royalties that must be paid by consumers to songwriters and legal enforcement of payments for economic rights to songs and/or music. The approach method used in this study is normative juridical and the research specifications used are descriptive-analytical. The data used are primary and secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method is in the form of a literature study and supplemented by interviews as supporting data. The results of the study indicate that the problem of strengthening song/and/or music royalties in restaurants in terms of royalty management in Indonesia actually has an adequate legal framework, but still requires improvements in the aspects of transparency, accountability, and efficiency. The use of digital technology for royalty management can be a solution in increasing public trust and making it easier for business actors to fulfill royalty payment obligations.

Keywords: Legal Compliance;Royalty of Music; Restaurant